

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM Mendukung KESETARAAN AKSES PENDIDIKAN DASAR MENUJU SDGS 4

Bunga Fryscilla Fedora Nadeak^{1*}, Mila Rahmawati², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

06-05-2026

Disetujui:

14-05-2026

Dipublikasi:

01-06-2026

Kata Kunci:

*Program Indonesia Pintar;
Akses Pendidikan;
Ketimpangan Pendidikan;
Kebijakan Pendidikan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dasar serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 4. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan analisis data sekunder, khususnya data angka anak tidak sekolah berdasarkan kuintil pengeluaran tahun 2022–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar berkontribusi dalam menurunkan angka anak tidak sekolah, terutama pada kelompok ekonomi terbawah. Namun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar kelompok pengeluaran. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program masih bersifat parsial dan belum optimal dalam menjangkau kelompok paling rentan. Kendala implementasi yang ditemukan meliputi ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, serta keterbatasan akses di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pendataan, validasi penerima, serta koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas program dalam mendukung pemerataan pendidikan dan pencapaian SDGs 4.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan, pola pikir, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Oleh karena itu, ketersediaan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan secara adil dan tanpa diskriminasi (Wartoyo, 2016).

Namun demikian, upaya mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sekolah seperti perlengkapan belajar, biaya transportasi, serta kebutuhan pendukung lainnya dapat menjadi beban yang cukup besar. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan, sehingga menimbulkan kesenjangan akses pendidikan di masyarakat (Sofiani et al., 2025).

Selain faktor ekonomi, hambatan lain juga turut memengaruhi akses pendidikan, seperti keterbatasan fasilitas, jarak antara tempat tinggal dengan sekolah, serta kondisi sosial tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Pendidikan dasar memiliki peranan penting karena menjadi fondasi awal dalam pembentukan kemampuan belajar dan karakter peserta didik yang akan berpengaruh pada jenjang pendidikan berikutnya (Aurellia et al., 2025).

Upaya pemerataan akses pendidikan juga tidak terlepas dari komitmen global dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat (SDGs 4) yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu guna mendukung keberlanjutan pendidikan. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya akses pendidikan. Dengan demikian, program ini memiliki peran strategis dalam upaya memperluas kesempatan belajar, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

Meskipun Program Indonesia Pintar dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain keterbatasan informasi yang diterima masyarakat, proses penyaluran bantuan yang belum optimal, serta penggunaan dana yang tidak selalu difokuskan pada kebutuhan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program masih memerlukan evaluasi agar manfaat yang diberikan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas Program Indonesia Pintar, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek distribusi bantuan dan tingkat partisipasi pendidikan. Penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar dalam kaitannya dengan kesenjangan akses pendidikan berdasarkan kelompok pengeluaran, serta relevansinya terhadap pencapaian SDGs 4.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kontribusi program tersebut dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 4 yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan pendidikan, khususnya implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam meningkatkan akses pendidikan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan.

Objek penelitian ini adalah kebijakan Program Indonesia Pintar sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi program dalam kaitannya dengan pemerataan akses pendidikan, khususnya berdasarkan perbedaan kelompok pengeluaran masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, Program Indonesia Pintar, serta Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah dan publikasi statistik, khususnya data angka anak tidak sekolah berdasarkan jenjang pendidikan dan kuintil pengeluaran tahun 2022–2023.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk mengidentifikasi pola ketimpangan akses pendidikan antar kelompok pengeluaran. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap temuan yang diperoleh.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program Indonesia Pintar serta kontribusinya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dan pencapaian SDGs 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Program ini menyasar jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SD, SMP, dan SMA/ sederajat), sementara pada jenjang pendidikan tinggi pemerintah menyediakan skema lain melalui KIP-Kuliah. Dengan demikian, PIP berperan sebagai instrumen intervensi negara dalam mengurangi hambatan ekonomi terhadap akses pendidikan.

Dalam implementasinya, mekanisme penentuan penerima PIP mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022, yang menggunakan data dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut menjadi dasar dalam proses seleksi dan verifikasi penerima bantuan. Integrasi antara Dapodik dan data kesejahteraan sosial menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. Namun demikian, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas dan validitas data yang diinput oleh satuan pendidikan.

Selain itu, pelaksanaan PIP didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatutan, dan manfaat. Prinsip-prinsip tersebut secara normatif mencerminkan tata kelola kebijakan publik yang baik (good governance). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2014), keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan implementasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dengan demikian, penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut terealisasi dalam praktik.

Untuk melihat kontribusi Program Indonesia Pintar terhadap pemerataan akses pendidikan, analisis dilakukan menggunakan data angka anak tidak sekolah berdasarkan jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran.

Tabel 1.
Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kuintil Pengeluaran Tahun 2022

| Jenjang | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SD | 1,19 | 0,65 | 0,54 | 0,54 | 0,51 |
| SMP | 11,50 | 7,30 | 6,16 | 5,05 | 3,86 |
| SMA/Sederajat | 33,38 | 25,09 | 21,47 | 18,46 | 13,08 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan data tahun 2022, terlihat adanya ketimpangan akses pendidikan yang cukup signifikan antar kelompok pengeluaran. Kelompok kuintil terbawah (K1) secara konsisten memiliki angka anak tidak sekolah yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kuintil atas (K5) pada seluruh jenjang pendidikan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi determinan utama dalam akses pendidikan di Indonesia. Untuk melihat dinamika perubahan, berikut disajikan data tahun 2023.

Tabel 2.
Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kuintil Pengeluaran Tahun 2023

| Jenjang | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SD | 1,15 | 0,58 | 0,58 | 0,46 | 0,38 |
| SMP | 10,11 | 7,33 | 6,14 | 5,37 | 5,05 |
| SMA/Sederajat | 30,66 | 23,21 | 19,65 | 19,31 | 14,67 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Perbandingan data tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya penurunan angka anak tidak sekolah, terutama pada kelompok kuintil terbawah (K1), khususnya pada jenjang SD dan SMA/ sederajat. Hal ini mengindikasikan adanya kontribusi Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok ekonomi rentan.

Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut, penurunan tersebut belum diikuti oleh penyempitan kesenjangan yang signifikan antar kelompok pengeluaran. Selisih antara K1 dan K5 masih relatif tinggi, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas Program Indonesia Pintar dalam mengurangi ketimpangan akses pendidikan masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam implementasi Program Indonesia Pintar. Masih terdapat peserta didik dari keluarga kurang mampu yang belum terakomodasi sebagai penerima bantuan, sementara di sisi lain terdapat kemungkinan inclusion error dalam pendistribusian bantuan.

Selain persoalan ketepatan sasaran, kendala lain juga ditemukan dalam proses penyaluran, seperti keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan akses di wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai (Nurokhmah, 2021). Permasalahan tersebut berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan bantuan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan peserta didik.

Jika dikaitkan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 4, yang menekankan pendidikan inklusif dan merata, maka Program Indonesia Pintar dapat dikatakan telah memberikan kontribusi awal dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun, berbagai kendala implementasi yang masih terjadi menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan pendidikan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam implementasi Program Indonesia Pintar, khususnya pada aspek pendataan dan validasi penerima manfaat agar bantuan dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi penting untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan serta memperluas jangkauan program, terutama di wilayah terpencil. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Program Indonesia Pintar dapat berkontribusi lebih optimal dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan mendukung pencapaian SDGs 4.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Indonesia Pintar (PIP) terbukti berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari kelompok ekonomi terbawah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penurunan angka anak tidak sekolah pada beberapa jenjang pendidikan, terutama pada kelompok kuintil pengeluaran terendah. Dengan demikian, program ini memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 4 yang menekankan pendidikan yang inklusif dan merata. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan tersebut belum diikuti oleh pengurangan kesenjangan akses pendidikan yang signifikan antar kelompok pengeluaran. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas Program Indonesia Pintar masih bersifat parsial dan belum

sepenuhnya mampu menjangkau kelompok yang paling rentan. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala implementasi, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, serta keterbatasan akses di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pendataan dan validasi penerima manfaat, serta peningkatan koordinasi antar lembaga guna memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi ketimpangan akses pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi selama proses penyusunan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan lebih baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data serta penyusunan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan terkait Program Indonesia Pintar dan upaya peningkatan akses pendidikan di Indonesiaterima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian yang kontribusinya tidak cukup signifikan untuk dimasukkan dalam kelompok penulis (authorship).

REFERENSI

- Aurellia, N. C., Putri, E. F. A., Rahajuni, D., & Anggraeni, O. (2025). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Angka Putus Sekolah di Kecamatan Sumbang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 84–92. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i1.4502>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dan Kuintil Pengeluaran*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4OCMy/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kuintil-pengeluaran.html>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar*.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nurokhmah, S. (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi kebijakan kesejahteraan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan. *Jurnal Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(1), 37–48. <https://doi.org/10.22146/jpmpm.v2i1.66256>
- Sofiani, I. K., Aisyah, N., & Diniati, R. (2025). Tantangan Pemerataan Akses dan Mutu Problematika Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13182–13190. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.26974>
- Wartoyo, F. X. (2016). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. *Yustisia*, 5(1), 216-230. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>